

# Kajian Tingkat Keadilan Distribusi Manfaat Antara Permukiman Terencana Dan Tidak Terencana Di Kota Semarang

L. C. P. Ningtyas<sup>1</sup>, A. Sugiri<sup>1</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Diponegoro, Indonesia

## Article Info:

Received: 23 June 2022

Accepted: 30 June 2023

Available Online: 06 April 2023

## Keywords:

Community Perception;  
equity of benefits;  
distribution; settlement;  
social Facilities and Services

## Corresponding Author:

Luluh Cahya Pangestu  
Ningtyas  
Diponegoro University,  
Semarang, Indonesia  
Email:  
[luluhpangestu05@gmail.com](mailto:luluhpangestu05@gmail.com)

**Abstract:** *The population of Semarang City continues to increase every year which has an impact on increasing demand for housing and good facilities. Therefore, it is necessary to ensure a equity distribution of development benefits such as social facilities and services in both planned and unplanned settlements. Planned settlements tend to have guarantees for the provision of social facilities and services compared to unplanned settlements. This study aims to determine the level of equity benefits distribution between planned and unplanned settlements based on the analysis of public perceptions of social facilities and services in Perumahan Graha Estetika and Perumnas Sendangmulya as planned settlements, Kampung Sekayu and Kelurahan Bandarharjo as unplanned settlements. The method used is quantitative through an online survey to 353 respondents with descriptive analysis techniques and Likert scale. The results showed that there were still differences where people in unplanned settlements most disagreed with the quality of clean water, roads and drainage. The level of equity benefits distribution in Perumahan Graha Estetika, Kampung Skeayu and Perumnas Sendangmulyo is in the fair category and Kelurahan Bandarharjo is in the moderate category.*

Copyright © 2016 JTPWK-UNDIP

This open access article is distributed under a  
Creative Commons Attribution (CC-BY-NC-SA) 4.0 International license.

## How to cite (APA 6th Style):

Ningtyas, L. C. P., & Sugiri, A. (2023). Kajian Tingkat Keadilan Distribusi Manfaat Antara Permukiman Terencana Dan Tidak Terencana Di Kota Semarang. *Jurnal Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Dan Kota)*, 12(1), 70–76.

## 1. PENDAHULUAN

Jumlah penduduk Kota Semarang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga mencapai 1,6 juta jiwa pada tahun 2022. Hal tersebut kemudian berdampak pada peningkatan kebutuhan akan tempat tinggal yang layak huni serta fasilitas penunjang yang memadai. Upaya untuk mewujudkannya salah satunya dengan menjamin keadilan terlebih berkaitan dengan distribusi manfaat pembangunan seperti fasilitas dan pelayanan sosial di kawasan permukiman terencana maupun tidak terencana. Hal ini karena kegagalan keadilan dalam pembangunan dapat menyebabkan adanya ketimpangan spasial (Sugiri, 2009). Orientasi penyediaan fasilitas dan pelayanan sosial sebagai komponen permukiman dan cakupan keterjangkauan penggunaannya perlu diperhatikan untuk pengembangan permukiman (Yuliasuti et al., 2020). Menurut Pigawati et al. (2019) salah satu faktor yang menentukan kualitas lingkungan permukiman yaitu ketersediaan fasilitas dan pelayanan dasar. Menurut Golany (1976) keberhasilan dari keberadaan fasilitas dan pelayanan sosial di kawasan permukiman dapat dilihat dari tingkatan bagaimana minat dan kesediaan masyarakat yang tinggal didalamnya untuk memanfaatkan fasilitas dan pelayanan sosial tersebut (Widyonarso & Yuliasuti, 2014).

Permukiman terencana pada awal pembangunannya telah diikuti oleh perencanaan fasilitas dan pelayanan sosial (Tilaar et al., 2012). Berbeda dengan permukiman tidak terencana dimana pembangunannya terjadi secara swadaya tanpa adanya perencanaan terlebih dahulu (Bisaga & Parikh, 2019). Hal ini kemudian membuat permukiman tidak terencana tidak memiliki jaminan atas

fasilitas dan pelayanan sosial. Oleh karena itu, salah satu upaya untuk mewujudkan permukiman yang layak huni adalah dengan memperhatikan distribusi fasilitas dan pelayanan sosial. Keadilan distribusi manfaat adalah prinsip dimana memberikan manfaat pembangunan yang maksimal kepada mereka yang memiliki kekayaan yang minim (Hananel, 2009). Keadilan (*equity*) apabila dibahas dalam aspek pembangunan wilayah dapat dijelaskan sebagai perasaan puas dan tidak puas bergantung pada apa yang dirasakan oleh penerima program pembangunan dimana perasaan puas tersebut dilihat dari rasa adil (*equity*) atas situasi yang diberikan. Deakin (1998) menyatakan bahwa suatu keadaan dikatakan adil *equity* apabila menghasilkan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi mereka yang paling tidak beruntung dalam masyarakat (Awuah & Booth, 2020). Sugiri (2009) menggagaskan mengenai konsep pembangunan wilayah berbasis keadilan (*Equity-Based Regional Development/EBRD*) dimana salah satu isunya yaitu mengenai akses ke fasilitas dan pelayanan sosial pada fungsi keadilan distribusi manfaat.

Evaluasi persepsi masyarakat terhadap fasilitas sosial merupakan salah satu indikator untuk mengidentifikasi tantangan penyampaian layanan di kawasan permukiman dan kesenjangan dalam penyampaiannya (Mutyambizi et al., 2020). Pengalaman masyarakat dalam aspek kebijakan (fasilitas sosial) terkait fungsi distribusi dapat menentukan persepsi mereka tentang isu keadilan (*equity*) sehingga dapat diketahui sejauh mana penerapan keadilan di wilayah tersebut (Sugiri & Nuraini, 2013). Masalah terkait distribusi fasilitas dan pelayanan sosial di kawasan permukiman muncul karena adanya ketidakadilan dalam pembangunan. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keadilan distribusi manfaat antara permukiman tncana dan tidak terencana berdasarkan persepsi masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan pelayanan sosial.

## 2. DATA DAN METODE

### 2.1. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dimana data kuantitatif yang dibutuhkan diperoleh di lapangan melalui instrumen kuesioner dengan *skala likert*. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan mengenai persepsi masyarakat terhadap fasilitas dan pelayanan sosial di kawasan permukiman untuk diketahui sejauh mana tingkat keadilan distribusi manfaat antara permukiman terencana dan tidak terencana. sedangkan data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen untuk mengetahui gambaran umum wilayah penelitian.

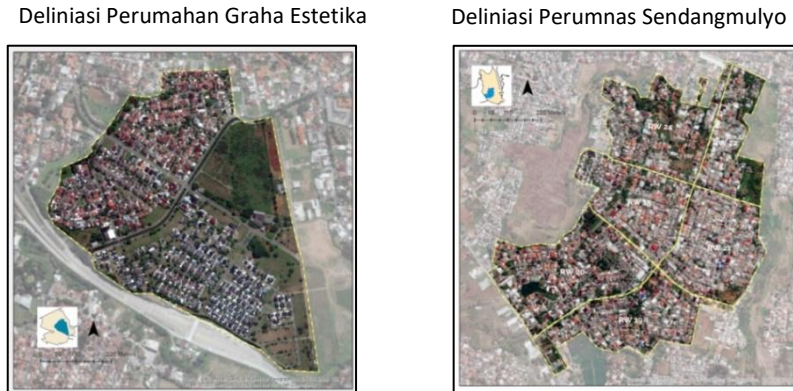
### 2.2 Teknik Penentuan sampel

Penelitian ini mengambil empat lokasi yang terbagi ke dalam dua jenis permukiman yaitu permukiman terencana dan tidak terencana dengan kondisi baik (*good*) dan buruk (*worse*). Permukiman terencana dengan kondisi baik (*good*) yaitu di Perumahan Graha Estetika dimana merupakan salah satu perumahan mewah di Kota Semarang. Permukiman terencana dengan kondisi buruk (*worse*) yaitu Perumnas Sendangmulyo yang merupakan perumahan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah). Sedangkan untuk permukiman tidak terencana dengan kondisi baik (*good*) mengambil lokasi di Kampung Sekayu, salah satu kampung kota tertua di Kota Semarang. Lokasi terakhir yaitu permukiman tidak terencana dengan kondisi buruk (*worse*) mengambil lokasi di Kelurahan Bandarharjo dimana merupakan kawasan permukiman kumuh berat di Kota Semarang. Populasi dalam penelitian ini yaitu kepala keluarga yang tinggal di masing-masing kawasan permukiman. Pengambilan kepala keluarga sebagai sampel dikarenakan pada etnis jawa, persepsi masyarakat biasanya diwakili oleh kepala keluarga (Sugiri & Nuraini, 2013). Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini yaitu *propotionate stratified random sampling*. Teknik sampling tersebut digunakan karena populasi pada penelitian ini heterogen dimana jumlah unit populasi tiap stratanya berbeda sehingga jumlah sampel yang diambil juga berbeda. Sampel pada penelitian ini diukur menggunakan rumus *slovin* (Bungin, 2010) dengan *margin of error* sebesar 10%.

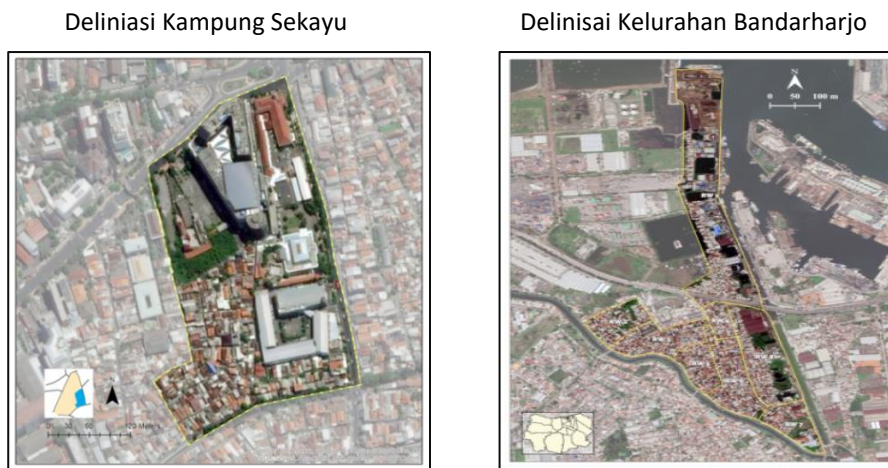
$$n = \frac{N}{N(d)^2 + 1} \quad (1)$$

Dimana  $n$  = ukuran sampel,  $N$  = jumlah populasi, dan  $d$  = derajat kesalahan. Sebaran jumlah responden yang dibutuhkan pada masing-masing lokasi penelitian tabel 1.

**Gambar 1.** Peta Deliniasi Permukiman Terencana (Analisis, 2022)



**Gambar 2.** Peta Deliniasi Permukiman Tidak Terencana (Analisis, 2022)



**Tabel 1.** Responden Penelitian. (BPS, 2021)

| Lokasi Penelitian            | Populasi | Jumlah Responden |
|------------------------------|----------|------------------|
| Perumahan Graha Estetika     | 358      | 78               |
| Perumnas Sendangmulyo        | 2.388    | 96               |
| <i>Kampung Sekayu</i>        | 386      | 80               |
| <i>Kelurahan Bandarharjo</i> | 5.080    | 98               |
| <b>Total</b>                 |          | <b>352</b>       |

\*Lokasi yang diketik miring merupakan permukiman tidak terencana

### 2.3 Teknik Analisis

Penelitian ini dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif dan analisis *skala likert*. Data yang dianalisis deskriptif adalah data yang berkaitan dengan tingkat keadilan distribusi manfaat dimana data tersebut disajikan dalam bentuk tabel, grafik maupun diagram untuk mempermudah menampilkan hasil data yang diperoleh. Analisis skala *likert* digunakan untuk mengukur persepsi

masyarakat mengenai fasilitas dan pelayanan sosial di setiap lokasi penelitian guna mengetahui tingkat keadilan distribusi manfaat antara permukiman terencana dan tidak terencana. Tingkat keadilan distribusi manfaat di kawasan permukiman terencana dan tidak terencana diklasifikasikan ke dalam skala 1-5 dengan kategori sangat adil (5), adil (4-4,99), sedang (3-3,99), tidak adil (2-2,99) dan sangat tidak adil (1-1,99).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Tingkat Keadilan Distribusi Manfaat Antara Kawasan Permukiman Terencana dan Tidak Terencana

Tingkat keadilan distribusi manfaat di kawasan permukiman didapat berdasarkan persepsi masyarakat terhadap fasilitas dan pelayanan sosial. Apabila merujuk pada Sugiri & Nuraini (2013), dengan mengetahui persepsi masyarakat terhadap fasilitas dan pelayanan sosial maka dapat diketahui sejauh mana penerapan keadilan di wilayah tersebut. Hal tersebut dikarenakan subjek utama dari keadilan adalah masyarakat (Moroni, 2020). Menurut Yulastuti et al., (2020) dalam perencanaan kawasan permukiman erat kaitannya dengan akses terhadap fasilitas dan pelayanan sosial, semakin buruk akses maka mempengaruhi minat warga untuk menggunakannya. Maka dari itu, pada penelitian ini hal yang dinilai adalah akses terhadap fasilitas dan pelayanan sosial serta kualitas dan kuantitasnya berdasarkan persepsi masyarakat. Fasilitas di kawasan permukiman yang dapat digunakan untuk dinilai kualitasnya menurut Pigawati et al., (2019) yaitu fasilitas pendidikan, kesehatan serta perdagangan/niaga. Sedangkan penelitian yang dilakukan Mutyambizi et al., (2020) menyatakan bahwa akses serta kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sosial dapat dianalisis dari berbagai aspek diantaranya listrik, kesehatan dan sanitasi. Sehingga, dalam menilai tingkat keadilan distribusi manfaat berdasarkan persepsi masyarakat, maka perlu mempertimbangkan variabel-variabel tersebut dan membandingkan antara permukiman terencana dan tidak terencana.

Hasil analisis didapatkan tingkat keadilan distribusi manfaat baik di permukiman terencana maupun tidak terencana berada pada kategori moderate hingga adil. Tingkat keadilan distribusi manfaat di kawasan permukiman terencana yaitu Perumahan Graha Estetika dan Perumnas Sendangmulyo berada pada kategori adil. Sedangkan tingkat keadilan distribusi manfaat di kawasan permukiman tidak terencana yaitu di Kampung Sekayu berada pada kategori adil dan Kelurahan Bandarharjo berada pada kategori moderate. Skor tertinggi keadilan distribusi manfaat berada di Perumahan Graha Estetika dimana merupakan permukiman terencana dengan kondisi baik (*good*). Sedangkan skor terendah tingkat keadilan distribusi manfaat berada di Kelurahan Bandarharjo yang merupakan permukiman tidak terencana dengan kondisi buruk (*worse*).

Berdasarkan hasil analisis, terdapat kecenderungan dari segi kondisi kawasan permukiman dimana masyarakat yang tinggal di permukiman terencana maupun tidak terencana dengan kondisi buruk (*worse*) yang paling merasa tidak setuju dengan kualitas fasilitas dan pelayanan sosial. Apabila merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Sugiri & Nuraini (2013) mengenai keadilan pada fungsi distribusi manfaat di wilayah Blitar, mendapati bahwa masyarakat dengan kondisi lebih buruk (*worse*) adalah yang paling merasakan kegalangan keadilan dalam distribusi manfaat. Fakta menarik didapatkan bahwa kawasan permukiman terencana yang memiliki jaminan atas penyediaan fasilitas dan pelayanan sosial tidak menjamin tingkat keadilan distribusi manfaatnya akan selalu lebih tinggi dibandingkan dengan permukiman tidak terencana yang tidak memiliki jaminan. Hal tersebut ditunjukkan oleh skor tingkat keadilan distribusi manfaat di Perumnas Sendangmulyo lebih rendah (4,00) dibandingkan dengan Kampung sekayu (4,07). Salah satu faktor yang mempengaruhi hal tersebut yaitu letak lokasi Kampung Sekayu yang strategis berada di pusat Kota Semarang sedangkan Perumnas Sendangmulyo berada di pinggiran Kota. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Sugiri & Nuraini (2013) dimana fasilitas dan pelayanan sosial telah tersedia dengan baik di daerah-daerah yang kegiatan produktifitasnya lebih tinggi.

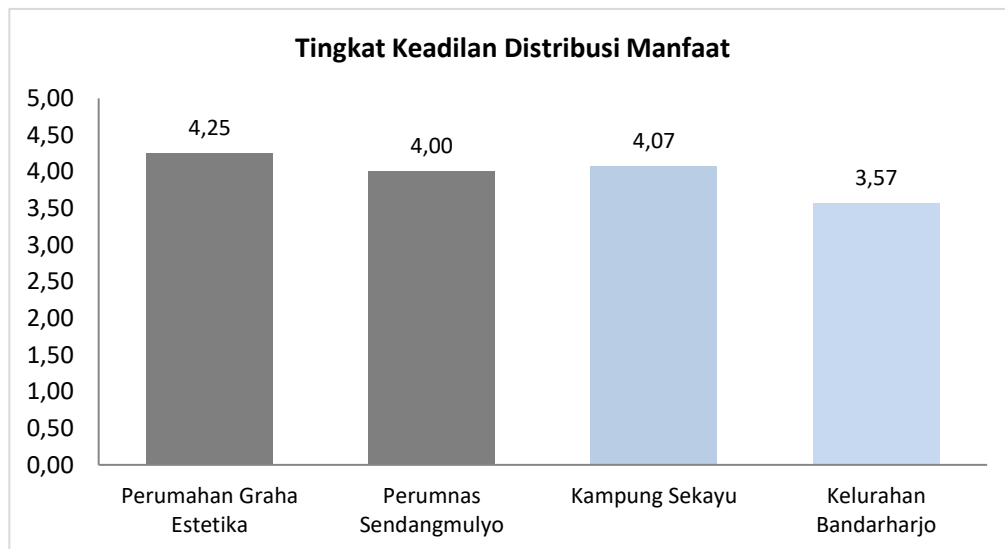
Meski demikian, apabila dirinci pada ketidakpuasan, masih terdapat masyarakat yang tinggal di permukiman tidak terencana yang merasa tidak setuju terhadap kualitas dari beberapa aspek fasilitas dan pelayanan sosial diantaranya :



### Air Bersih

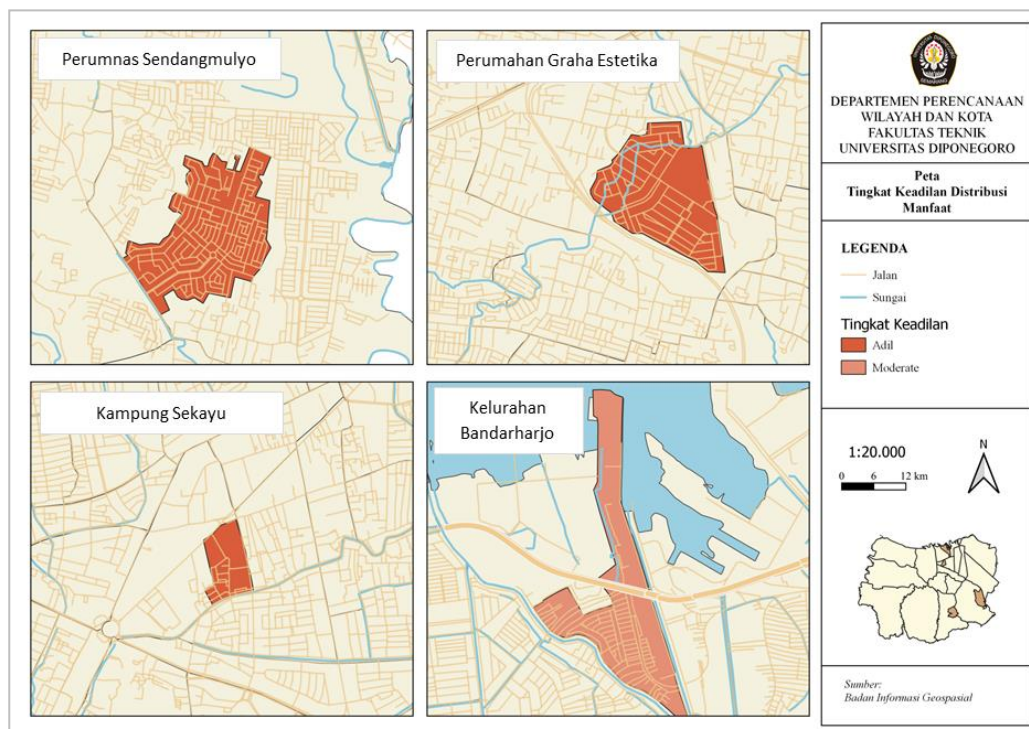
Masyarakat di permukiman terencana dan tidak terencana setuju bahwa penyediaan air bersih yang memadai penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, terdapat perbedaan yang dirasakan oleh masyarakat terhadap kualitas air bersih antara permukiman terencana dan tidak terencana. Berdasarkan data yang didapatkan sebanyak 37,5% responden di Kampung Sekayu dan 30% responden di Kelurahan Bandarharjo menjawab tidak setuju terhadap kualitas air bersih dimana kedua lokasi tersebut merupakan kawasan permukiman tidak terencana. Hal tersebut disebabkan oleh kualitas air bersih yang berwarna kekeruhan dan hanya dapat digunakan untuk keperluan rumah tangga selain memasak.

**Gambar 3.** Tingkat Keadilan Distribusi Manfaat (Analisis, 2022)



\*grafik berwarna biru adalah permukiman tidak terencana

**Gambar 4.** Peta Tingkat Keadilan Distribusi Manfaat (Analisis, 2022)



## Jalan Lingkungan

Kualitas jaringan jalan yang memadai perlu untuk diperhatikan dimana menurut dokumen Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan (Badan Standardisasi Nasional, 2004) seharusnya tidak berlubang, tidak bergelombang dan tidak berdebu untuk menjamin aksesibilitas yang baik bagi masyarakat. Tingkat keadilan pada jaringan jalan berada pada kategori moderate hingga adil. Namun, masih terdapat perbedaan yang dirasakan oleh masyarakat terhadap kualitas jaringan jalan antara permukiman terencana dan tidak terencana. Sebanyak 44% responden di Kelurahan Bandarharjo menjawab tidak setuju dengan kualitas jaringan jalan yang memadai. Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa titik jalan yang rusak dan berlubang sehingga mengganggu kenyamanan pengendara dan menyebabkan genangan saat hujan. Selain itu, sebanyak sebanyak 59% yang merasa tidak setuju dengan kondisi lebar jalan lingkungan. Lebar jalan dirasa terlalu sempit dan hanya bisa dilewati oleh kendaraan roda dua. Akan tetapi, untuk panjang jalan, kualitas jalan serta perawatan jalan dirasa sudah cukup memadai.

## Drainase

Kualitas saluran drainase yang tidak memadai dapat menyebabkan berbagai permasalahan seperti menimbulkan genangan hingga menyebabkan banjir. Maka dari itu perlu untuk menjamin penyediaan saluran drainase yang memadai di kawasan permukiman. Tingkat keadilan pada saluran drainase berada pada kategori moderate hingga tidak adil. Sangat disayangkan, masih terdapat kawasan permukiman yang mendapat skor tidak adil yaitu di Kelurahan Bandarharjo yang merupakan kawasan permukiman tidak terencana dengan kondisi buruk (*worse*). Berdasarkan persepsi masyarakat sebanyak 63% tidak setuju dengan kualitas dari saluran drainase karena dirasa kurang memadai dimana masih tersumbat di beberapa titik. Lalu sebanyak tidak setuju terhadap 42% tidak setuju mengenai perawatan saluran drainase yang mana dirasa tidak rutin dilakukan perawatan.

## 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini terdapat beberapa hal yang bisa disimpulkan. Skor tingkat keadilan distribusi manfaat Perumahan Graha Estetika, Kampung Sekayu dan Perumnas Sendangmulyo berada pada kategori adil sedangkan Kelurahan Bandarharjo berada pada kategori sedang. Skor tertinggi berada di Perumahan Graha Estetika yang merupakan permukiman terencana sedangkan skor terendah berada di Kelurahan Bandarharjo yang merupakan permukiman tidak terencana. Masyarakat yang tinggal di kawasan permukiman tidak terencana yang paling merasa tidak setuju dengan kualitas air bersih, jalan lingkungan dan drainase. Namun, temuan menarik didapatkan dimana permukiman terencana yang memiliki jaminan terhadap fasilitas dan pelayanan sosial tidak menjamin skor keadilannya selalu lebih tinggi dibandingkan permukiman tidak terencana dibuktikan dengan skor di Kampung Sekayu lebih tinggi dibandingkan dengan Perumnas Sendangmulyo. Salah satu faktor yang mempengaruhinya yaitu letak lokasi dimana Kampung Sekayu berada di pusat kota sedangkan Perumnas Sendangmulyo berada di pinggiran Kota Semarang.

## 5. REFERENSI

- Badan Standardisasi Nasional. (2004). SNI 03-1733-2004 Planning Procedures for Housing Environment in Urban Areas [Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan]. *Badan Standardisasi Nasional*.
- Bisaga, I., & Parikh, P. (2019). *Challenges and Opportunities for Sustainable Urban Farming in South African Low-Income Settlements : A Case Study in Durban*.
- Gyau Baffour Awuah, K., & Booth, C. A. (2020). Evaluation of Equity in Informal Land Development Systems in Two Nigerian Cities. *Journal of Urban Planning and Development*, 146(4), 04020037. [https://doi.org/10.1061/\(asce\)up.1943-5444.0000609](https://doi.org/10.1061/(asce)up.1943-5444.0000609)
- Hananel, R. (2009). Distributive justice and regional planning: The politics of regional revenue-generating land uses in Israel. *International Planning Studies*, 14(2), 177–199. <https://doi.org/10.1080/13563470903021233>
- Moroni, S. (2020). The just city. Three background issues: Institutional justice and spatial justice,

- social justice and distributive justice, concept of justice and conceptions of justice. *Planning Theory*, 19(3), 251–267. <https://doi.org/10.1177/1473095219877670>
- Mutyambizi, C., Mokhele, T., Ndinda, C., & Hongoro, C. (2020). Access to and satisfaction with basic services in informal settlements: Results from a baseline assessment survey. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(12), 1–21. <https://doi.org/10.3390/ijerph17124400>
- Pigawati, B., Yulastuti, N., Mardiansjah, F. H., & Suryani, M. A. (2019). Changes of Settlement Environmental Quality in Semarang City Center. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 313(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/313/1/012009>
- Pigawati, Bitta, Yulastuti, N., & Mardiansjah, F. H. (2019). Settlements growth and development in Semarang city centre area, Indonesia. *Journal of Settlements and Spatial Planning*, 10(2), 99–109. <https://doi.org/10.24193/JSSP.2019.2.03>
- Sugiri, A. (2009). Redressing Equity Issues in Natural Resource-Rich Regions: A Theoretical Framework for Sustaining Development in East Kalimantan, Indonesia. In E. L. Weber, *Environmental Ethics: Sustainability and Education* (pp. 107-135). Oxford: Inter-disciplinary Press.
- Sugiri, A., & Nuraini, N. (2013). Towards equity-based regional development: Addressing spatial inequality in the blitar region. *International Journal of Civic, Political, and Community Studies*, 10(3), 91–109. <https://doi.org/10.18848/2327-0047/cgp/v10i03/43522>
- Tilaar, Sonny; Rogi, Octavianus H.A, Tinangon, A. J. (2012). *MEDIA MATRASAIN Oleh* : 9(1), 21–25.
- Widyonarso, E. S., & Yulastuti, N. (2014). Tingkat Aksesibilitas Fasilitas Sosial Berdasarkan Konsep Unit Lingkungan Di Perumnas Banyumanik Kota Semarang [Accessibility Level of Social Facilities Based on Neighborhood Unit Concept in Perumnas Banyumanik Semarang City]. *Jurnal Ruang*, 2(4), 351–360. <https://media.neliti.com/media/publications/220981-tingkat-aksesibilitas-fasilitas-sosial-b.pdf>
- Yulastuti, N., Haryanto, R., & Haryanti, V. G. (2020). The Assessment of Social Housing through the Availability of Social Facilities. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 409(1), 0–8. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/409/1/012026>